

Editor:
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.
Syaifulloh, S.Pd., M.Si.
Muhammad Mona Adha, M.Pd.
Candra Cuga, M.Pd.



Laboratorium PKn FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PENGUATAN KOMITMEN AKADEMIK DALAM MEMPERKOKOH JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4 April 2015
Auditorium Gedung Nu'man Somantri (FPIPS)
Universitas Pendidikan Indonesia



DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Sambutan Rektor	v
Sambutan Dekan FPIPS	vi
Sambutan Ketua Departemen PKN FPIPS	vii
Sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) AP3KNI	viii
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar dan Rakernas AP3KNI Tahun 2015	ix
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKN) UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA: REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN Udin S. Winataputra, Riza Alrahman	1
2. PERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Soedijarto	24
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Sjamsi Pasandaran	36
4. PENGEMBANGAN <i>CIVIC INTELLIGENCE</i> BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR Masrukhi dan Tommi Yuniawan	52
5. REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dasim Budimansyah	66
6. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PKN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI BERBASIS KKN Sapriya	76
7. DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA Cecep Darmawan	95
8. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DARI KETERLIBATAN WARGANEGARA (<i>CIVIC ENGAGEMENT</i>): TINJAUAN TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRAUUSAHA (PMW) Syaifullah	102
9. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN), Apeles Lexi Lonto	121

10. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGEMBANGAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN <i>SOFT SKILLS</i> MAHASISWA Asep Mahpudz.....	130
11. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Atmawarni	140
12. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : UPAYA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN MAHASISWA Aziz Taufik Hirzi	146
13. PERAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN ANTARA PANCASILA SSEBAGAI “RUH” DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI “BADAN” Bartolomeus Samho.....	152
14. STUDI KORELASI ANTARA PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STKIP SINTANG Dessy Triana Relita.....	165
15. MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (<i>CIVIC VIRTUE</i>) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Dikdik Baehaqi Arif.....	175
16. MAPPING KESADARAN HUKUM MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Studi Kasus Perilaku Mahasiswa di Universitas X) M. Yahya Arwiyah.....	186
17. PENGUASAAN KONSEP IPS DALAM UPAYA PEMBERIAN PEMBEKALAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR Eliana Yunitha Seran.....	190
18. TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SIMEULUE (<i>SMONG</i>) DALAM PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Hasbi Ali.....	201
19. REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Hasan Suryono.....	211
20. PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Indriyana Dwi Mustikarini	219
21. PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 M. Sulthon	226

22.	AKTUALISASI PENDIDIKAN KETELADANAN DALAM MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA Maimun	242
23.	SEMANGAT KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Mardawani	251
24.	BERANI MENGAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGI PERAN DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN Miming Karmilah	261
25.	KEMAMPUAN SISWA DALAM MANAJEMEN MITIGASI BENCANA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI <i>CIVIC SKILL</i> WARGA NEGARA Muhammad Mona Adha	276
26.	KEPEMIMPINAN DALAM INTEGRITAS PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PANCASILA Nana Setialaksana	294
27.	PENEGUHAN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI Nurul Zuriah	301
28.	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA GLOBAL Runik Machfiroh	312
29.	OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI Rusli Yusuf	318
30.	KONTRIBUSI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER PADA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sabarudin	328
31.	PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIA DI KELAS VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Sapto Purnomo	336
32.	REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA Siska Diana Sari	341

33. PENGUATAN JATIDIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Sri Kunarsih.....	350
34. MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN HUKUM YANG HOLISTIK Sumaryati.....	354
35. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KOMUNITAS BAGI APARAT PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MENGHADAPI ARUS MODERNISASI POLITIK Supriyadi.....	362
36. DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI Susan Fitriasari	376
37. URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN Triwahyuningsih.....	384
38. PENERAPAN PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MEMAHAMI KONSEP HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Winarno	391
39. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MENYADARKAN WARGANEGARA AKAN HAK DAN KEWAJIBAN Yunisca Nurmalisa.....	396
40. KAJIAN MAKNA NILAI HISTORIS DAN BUDAYA DALAM <i>NATIONAL COSTUME</i> DI AJANG INTERNASIONAL SEBAGAI JATI DIRI BANGSA Agustinus Tampubolon.....	403
41. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA CITA DAN REALITA Triyanto	417
42. UPAYA MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DALAM MEMBINA BUDAYA DISIPLIN UNTUK MEWUJUDKAN KAREKTER BANGSA Dede Iswandi	423
43. REAKTUALISASI EMPAT KONSENSUS KEBANGSAAN INDONESIA UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (<i>SMART AND GOOD CITIZENS</i>) Efi Miftah Faridli.....	430

44. PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN (<i>ECONOMIC CIVIC</i>) PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS Epin Saepudin.....	440
45. MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN Pebriyenni.....	453
46. PENGUATAN JATIDIRI PK _n MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015 Riyan Yudistira	463
47. REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Samsuri.....	478
48. PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENDUKUNG KARAKTER KEJUJURAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PK _n Shilmy Purnama	485
49. PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN CALON GURU PPK _n MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS <i>BLENDED LEARNING</i> DI PERGURUAN TINGGI Siti Awaliyah.....	492
50. MENANAMKAN KEBAJIKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sylvester Kanisius	501
51. REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Wildan Nurul Fajar	509
52. KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR Julien Biringan.....	517
53. MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM PEMIKIRAN POSTMODERNIS Ana Andriani	530
54. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF UNTUK MENGEMBANGKAN WAWASAN GLOBAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Mukhamad Murdiono	539
55. UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Marintan Lasrida Sitorus	551

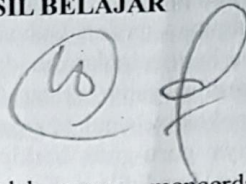
56. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KEKINIAN DI INDONESIA Nurhadianto	568
57. TANTANGAN PK _n SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI Nurharmi.....	579
58. KERANGKA PEMIKIRAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Petrus Irianto	591
59. URGENSI PENILAIAN RANAH AFEKTIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Rohani	599
60. RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PENDIDIKAN DAMAI DALAM MEMBANGUN WARGANEGARA DEMOKRATIS DI SEKOLAH Candra Cuga	610
61. PANDANGAN FILSAFAT ESSENSIALISME DALAM MEMPERKOKOH PK _n SEBAGAI <i>INTEGRATED SYSTEM OF KNOWLEDGE</i> Eli Karliani	622
62. PRAKSIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH : BELAJAR DARI PENGALAMAN Leni Anggraeni	634
63. KOSMOPOLITANISME APAKAH ANCAMAN ATAU TANTANGAN BAGI PENGEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA? Lili Halimah	645
64. MEMOTRET CIVIC ENGAGEMENT DI INDONESIA Sunarto Amus	656
65. EKSISTENSI PKN DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN INSTITUSI ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN Susena.....	669
66. PERAN AP3KNI SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ETNOPELAGOGIK UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS KEBANGKITAN NASIONAL MODERN Iim Siti Masyitoh.....	674
67. PENGUATAN JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Deny Setiawan.....	684

68. KONSTRUK KURIKULER PENDIDIKAN AFEKSI SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARA
Nani Nur'aeni..... 696
69. PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
Dwi Iman Muthaqqin 711
70. METODE PEMBELAJARAN KLIK BERBASIS *MIND MAP* DALAM MEMANFAATKAN CARA KERJA OTAK SEBAGAI MESIN ASOSIASI UNTUK MENGATASI KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
Dadang Sundawa 720
71. REVITALISASI GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS: MENJAWAB TANTANGAN BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) PADA LEVEL PUBLIK
Sri Wahyuni Tanszil..... 735
72. *CITIZEN POLITICS* (POLITIK KEWARGANEGARAAN) SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU DALAM KAJIAN PKn: TANTANGAN ANALISIS FILOSOFIK
Halking 743
73. ESENSI SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI JAWA BARA
Prayoga Bestari..... 757
74. REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Rini Irianti Sundary 767
75. PENGUATAN JATI DIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGAKTUALISASIKAN MORALITAS PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBENTUK *GOOD CITIZEN*
Triana Rejekiningsih..... 775
76. PROSES PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
Ruslan 789
77. MEMAKNAI HAKIKAT DAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA
Yuyus Kardiman 798

78. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONTEKSTUAL BERBASIS *LIVING VALUES EDUCATION*: SEBUAH PENGALAMAN PRAKSIS
Kokom Komalasari..... 811
79. URGENSI PENGUATAN PKN SEBAGAI PROGRAM SOSIAL-KULTURAL KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA KARAKTER SISWA
Rahmat..... 824
80. ANTIKORUPSI SEBAGAI SUMBER MATERI DAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH
Harmanto dan Totok Suyanto 839
81. PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA,
Wahyu Widodo 849
82. STUDI PENELUSURAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 dan S1 PPKn PIPS- FKIP UNIVERSITAS TERBUKA
Syaiful Mikdar, Sriyono, Sri Sumiyati 861
83. PENYELARASAN KURIKULUM S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
Sriyono, Syaeful Mikdar dan Yos Sudarso 877
84. PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA SIKAP DEMOKRATIS SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO
Elly Hasan Sadeli 900
85. MEMBANGUN WARGA NEGARA SADAR KONSTITUSI MELALUI REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Sri Suneki 907
86. PENTINGNYA PEMAHAMAN KE- INDONESIAAN BAGI WARGA BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI (KASUS KE INDONESIAAN DI PAPUA)
Bernarda Meteray 913
87. INKLUSI DEMOKRASI TERHADAP MINORITAS (Tantangan Indonesia dalam Membangun Politik Inklusi Demokratis)
Halili..... 923

KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR

Oleh.
Julien Biringan



Abstrak

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Pendidikan, Mutu Guru, Mutu Dosen

Pendahuluan

Pelaksanaan cita-cita bangsa dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, (UU Aparatur Sipil Negara, 2014: iii). Kemudian ditegaskan pula bahwa sebagai pelaksana aparatur sipil negara diwajibkan mengelola dan mengembangkan profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen.

Sehubungan dengan itu, guru adalah sebagai salah satu komponen dalam aparatur sipil negara berkewajiban untuk mewujudkannya, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pada bagian konsiderans, dimana pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sesuai dengan maksud dari undang-undang yang dimaksudkan di atas, maka guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan, sehingga guru perlu meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya yang berkualitas sebagai suatu profesi yang bermartabat. Guru yang dimaksudkan adalah yang melaksanakan tugas pokok sebagai tenaga pendidik dan pengajar di sekolah-sekolah, termasuk di dalamnya guru-guru berkprah dengan tugas pokok sebagai pengajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kualitas kinerja guru PKn dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan indikator utama dan menjadi penentu tercapainya optimalisasi proses pembelajaran yang sekaligus merupakan penentu tercapainya hasil belajar siswa yang optimal. Sebab optimalisasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran PKn dapat mengacu pada berbagai upaya dari guru itu sendiri agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik, apalagi pengajaran PKn berorientasi pada pembelajaran nilai, moral dan norma. Dalam kondisi seperti inilah guru PKn dituntut harus memiliki akuntabilitas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sehingga peserta didik dalam hal ini siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal secara komprehensif baik pada domain kognitif, afektif maupun psikomotor.

Pembahasan

Kinerja Guru Sebagai PNS Sesuai Undang-Undang.

Guru sebagai pegawai negeri sipil harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ditegaskan dalam undang-undang ini bahwa hak guru sebagai PNS memiliki haknya yakni memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, Cuti, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan, dan Pengembangan kompetensi. Kemudian yang menjadi kewajibannya adalah setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen pada ketentuan umum pasal 1, menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian pada pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional

sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Begitu pula pada pasal 6 menegaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada bagaimana para personel dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam organisasi di sekolah, berhasil tidaknya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas utama guru adalah mengelola kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran yang membidangnya, termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kinerja guru dalam kapasitas ini merupakan indikator utama untuk mencapai keberhasilan dari program pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Apabila mengkaji tentang kinerja guru sebagai pengajar, maka beberapa pendapat, seperti menurut Uzer Usman mencakup aspek kemampuan personal, kemampuan profesional dan kemampuan sosial, (Uzer, Moh Usman, 2005:16). Kemudian dalam bahasa Inggris disebut *Performance* diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja, (Sedarmayanti, 2001:50)

Selanjutnya menurut Gomes, kinerja merupakan catatan terhadap hasil produksi dari sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu. Menurut Winardi kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian karyawannya berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Selain itu, ada juga beberapa pendapat para pakar tentang pengertian kinerja, yakni menurut Bateman, kinerja adalah proses kerja dari seorang individu untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam Suharsaputra, mengatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nanang Fattah, Prestasi kerja atau penampilan kerja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang disasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Pariata *Westra et al*, *Performance* diartikan sebagai hasil pekerjaan, atau pelaksanaan tugas pekerjaan, (Uhar Suharsaputra, 2010:144-145).

Sejalan dengan itu, maka As'ad (<http://guruvalah>, 2009) memberikan pengertian kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku

untuk pekerjaan yang bersangkutan. Bernardin dan Russel dalam Ruky memberikan definisi tentang *performance* sebagai hasil atau apa yang keluar (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi. Begitu pula dengan Ilyas mengungkapkan bahwa kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok.

Kemudian menurut Fattah, prestasi kerja atau penampilan kerja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu, (Fattah, Nanang, 2003:9). Begitu pula dengan pandangan August W. Smith menyatakan kinerja adalah "*Output drive from processes, human or otherwise*", jadi kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Sedangkan menurut Mathis, mengungkapkan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan, (Mathis, Robert L dan Jackson, John H. 2002:78).

Mengenai kinerja guru yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini, yang dimaksudkan adalah bahwa kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan bagi mutu pembelajaran/pendidikan yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan setelah menyelesaikan sekolah. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, yang awalnya menyangkut pendidikan dan pengajaran di sekolah yang dilakukan pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya juga harus ditentukan dari karakteristik guru itu sendiri. Sebab karakteristik Guru yang baik dan berkualitas memiliki kesadaran akan tujuan, memiliki harapan akan keberhasilan bagi semua siswa, mentoleransi ambiguitas, menunjukkan kemauan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa, merasa tidak nyaman jika kurang mengetahui, mencerminkan komitmen pada pekerjaan mereka, belajar dari berbagai model, dan menikmati pekerjaan dari siswa mereka.

Selanjutnya dapat ditegaskan oleh Danim bahwa kualitas guru yang baik adalah *confidence* (keyakinan diri sendiri), *Patience* atau kesabaran (guru-guru terbaik bisa membantu siswa yang mengalami gangguan mental), *True compassion for their students* atau memiliki rasa kasih sayang sejati pada siswanya, *understanding* atau pemahaman, *dedication to excellence* atau dedikasi untuk keunggulan, *unwavering support* atau teguh dalam memberikan dukungan, *willingness to help student achieve* atau kesediaan untuk membantu siswa mencapai prestasi, *Passion for life* atau bergairah untuk hidup, (Sudarwan Danim, 2010:40-45)

Sehubungan dengan itu, maka Melissa Kelly mengatakan ada lima hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru, yaitu: komitmen waktu, besarnya bayaran, apresiasi dan kewajaran, harapan masyarakat, dan komitmen emosional. Ditegaskan Melissa Kelly, bahwa guru harus bersikap positif. Sikap positif merupakan aset besar dalam hidup. Guru akan melemparkan banyak pola kurva dalam hidup dan terutama dalam profesi mengajar. Sikap positif akan membantu guru mengatasi ini dengan cara terbaik. Guru juga konsisten dalam rangka untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, siswa tahu apa yang diharapkan dari guru setiap hari. Guru memiliki rasa keadilan. Seorang guru yang konsisten adalah orang yang dari hari ke hari sikap dan

tindakannya sama. Seorang guru yang adil memperlakukan setiap siswa sama dalam situasi yang sama. Guru memiliki keluwesan dan fleksibilitas. Salah satu prinsip pengajaran bahwa segala sesuatu harus dalam keadaan konstan berubah. Interupsi dan gangguan adalah normal, dan guru harus siap memodifikasi perilaku dan sikap itulah pilihan yang benar.

Adapun guru yang dimaksudkan adalah orang yang pekerjaannya sebagai pendidika dan pengajar di sekolah. Tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu; *Pertama*, tugas dalam bidang profesi. Guru merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus, jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapabelitas di bidang pendidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi aspek mendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan kepada siswa, dan melatih. *Kedua*, tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dari siswa. Ia harus mampu menarik simpati sehingga dapat menjadi panutan para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikannya hendaknya dapat dijadikan motivasi bagi siswa dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswa. *Ketiga*, tugas dalam bidang kemasyarakatan dimana masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju kepada pembentukan manusia seutuhnya, (Moh. Uzer Usman, 2006:16).

Kewajiban guru yang dimaksudkan di atas adalah menyangkut tugas pokok dari guru itu sendiri, dimana tugas guru sebagai pendidik dan pengajar dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan untuk memberi bekal pada anak-anak agar memperoleh kehidupan yang layak setelah mencapai kedewasaannya kelak. Kemudian guru seharusnya dapat menjalankan fungsinya, diantaranya mengajar (*teaching*) yaitu memindahkan ilmu pengetahuan, pelatihan (*training*) yaitu membimbing keterampilan tertentu dan *coaching* yaitu memberdayakan potensi individu dari masing-masing siswa yang menjadi anak didiknya, (Hadari Nawawi, 1985:9).

Tugas dan fungsi guru seperti dimaksudkan di atas merupakan suatu bentuk kinerja yang dapat diakualisasikan, maka dapat ditegaskan bahwa kinerja guru atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, kemudian pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar. Kinerja seorang guru dilihat dari sejauh mana guru tersebut melaksanakan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan memotivasi siswa untuk belajar dan kerjasama dengan guru lain. Kinerja guru sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh guru pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Suryo Subroto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang

edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup suasana kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar mencapai tujuan pengajaran, (Suryo Subroto, 1997:3).

Namun demikian untuk mencapai target tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru, seperti menurut Payaman J. Simanjuntak menyebutkan bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu: Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu; (1). Kemampuan dan keterampilan kerja, (2). Motivasi dan etos kerja, (Payaman Simanjuntak, 2005:10-13). Hal ini pula termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kemampuan (*ability*) guru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar mencakup empat macam, meliputi: *Pertama*, Kemampuan Pribadi, yakni kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan merinci kemampuan pribadi guru yang meliputi; (a) Kemantapan dan integrasi pribadi. (b) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan. (c) Berfikir alternative. (d) Adil, jujur, dan objektif. (e) Disiplin dalam melaksanakan tugas. (f) Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya. (g) Simpatik, menarik, luwes, dan bijaksana. (h) Berwibawa, (Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyana, 2007:21). Sedangkan kalau menurut Moh. Uzer Usman menerangkan bahwa kemampuan pribadi guru meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian. (b) Berinteraksi dan berkomunikasi. (c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. (d) Melaksanakan administrasi pendidikan. (e) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, (Moh. Uzer Usman, 2000:16-17).

Akhirnya dikatakan bahwa kemampuan pribadi menjadikan guru dapat mengelola dan berinteraksi secara baik serta mengelola proses belajar mengajar. Guru juga harus mempunyai kepribadian yang utuh karena bagaimanapun guru merupakan suri tauladan bagi anak didiknya. *Kedua*, Kemampuan profesional, yakni kemampuan dalam penguasaan akademik yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus, sehingga guru memiliki wibawa akademis. Menurut Cece Wijaya, kemampuan profesional guru meliputi: menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan sumber media pengajaran, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk keperluan pengajaran, (Cece`Wijaya, 2007:16-17). *Ketiga*, Kemampuan Sosial, kemampuan yang berhubungan dengan bentuk partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tempat ia bekerja, baik secara formal maupun informal, yang menurut Cece Wijaya meliputi: (1) terampil berkomunikasi dengan peserta didik, (2) bersikap simpatik, (3) dapat bekerjasama dengan guru bimbingan konseling, (4) pandai bergaul dengan kawan sejawat dan mitra pendidikan. *Keempat*, Kemampuan Pedagogik yakni kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi

pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, guru sebagai makhluk yang dibekali potensi kemampuan tertentu, dan untuk mengaplikasikan serta mengembangkan kemampuan tersebut diperlukan suatu latihan dan pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya, dan kompetensi yang dimaksudkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya apabila mengkaji tentang kinerja guru yang berkualitas, harus memiliki alat ukurnya, dimana berkaitan dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja guru bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik dan pengajar.

Pelaksanaan penilaian kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan proses belajar mengajar. Diknas sampai saat ini belum melakukan perubahan yang mendasar tentang standar kinerja guru, dan secara garis besar masih mengacu pada rumusan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Kompetensi yang dimaksudkan adalah kedua belas kompetensi, dan inilah yang dapat dilihat melalui alat penilaian kemampuan guru (APKG). Aspek-aspek APKG secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga kemampuan, yaitu: (1). Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran, (2). Kemampuan guru dalam mengajar di kelas, yang meliputi menggunakan metode, media dan bahan latihan, berkomunikasi dengan siswa, mendemonstrasikan khasanah metode mengajar, mendorong mengadakan keterlibatan siswa dalam pengajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran, mengorganisasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan, dan evaluasi hasil belajar, (3). Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi, yang meliputi: membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain, menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam proses belajar mengajar serta dalam pelajaran yang diajarkan, dan mengelola interaksi pribadi dalam kelas, (Standart Kompetensi Guru, Depdiknas., 2004:7).

Pada dasarnya kualitas kinerja guru seperti dimaksudkan di atas adalah guru yang dikatakan profesional, dimana seperti dikatakan oleh Beth Lewis dalam Danim, bahwa sebagai guru profesional adalah guru yang sukses memiliki harapan tinggi secara terus-menerus, mampu berpikir kreatif, fleksibel dan sensitif tingkat tinggi, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan berkembang atau curiositas, mereka adalah manusia sempurna (guru-guru yang paling efektif membawa seluruh dirinya untuk pekerjaan), senang belajar dan menjalani kehidupan, (Sudarwan Danim, 2010: 154-157). Selain itu kalau menurut Ron Clark, guru yang profesional harus memiliki 11 kualitas unggul dari guru untuk memotivasi dan menginspirasi serta mendidik anak, yaitu: antusiasme, petualangan, kreativitas, refleksi, keseimbangan, empati, keyakinan, humor, pikiran sehat, penghargaan dan ketahanan. Kesebelas indikator kualitas guru

yang unggul tersebut merupakan jati diri yang harus dimiliki sebagai pribadi guru ideal, karena hal itu juga merupakan indikator utama bagi guru yang harus melakukan tugas pokok untuk mendidik dan mengajar terutama dalam konteks ini pada bidang pendidikan Kewarganegaraan.

Idealnya setiap guru harus memiliki wawasan yang baik tentang nilai, norma dan moral, sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam pendidikan. Lebih-lebih bagi guru PKn, guru mata pelajaran yang oleh beberapa pihak dipandang sebagai representative pendidikan moral. Memang dalam rambu-rambu GBPP-PPKn mulai kurikulum 2004 dinyatakan bahwa ruang lingkup PPKn meliputi (1) nilai, moral dan norma, (2) kehidupan ideologi, politik, ekonomi social budaya, pertahanan keamanan, dan perkembangan iptek. Namun demikian ternyata apa yang tercantum dalam rambu-rambu ruang lingkup tersebut tidak disertai penjelasan apapun serta tidak pernah jelas dalam implementasi pembelajarannya, (Kosasih Djahiri, 1999)

Namun demikian terdapat banyak keluhan umum para guru dalam menghadapi pengajaran nilai karena merupakan konsep yang abstrak, tidak jelas body of knowledge-nya, serta sangat terbatasnya sumber bahan pembelajaran. Keluhan tersebut dapat dipahami, sebab topic-topik nilai tersebut sesungguhnya termasuk dalam kajian filsafat, khususnya filsafat nilai (aksiologi). Sedangkan dalam kajian tradisi persekolahan atau pendidikan formal kita, hingga tingkat perguruan tinggi sekalipun, kajian filsafat kurang memperoleh perhatian yang layak. Berbeda dengan sumber bahan untuk pengembangan topic-topik keilmuan, termasuk ilmu politik dan ilmu hukum, referensinya sangat banyak. Sehingga akibat dari permasalahan yang dikemukakan itu muncullah kondisi yang sangat ironis, yakni ketidak siapan guru dalam pembelajaran dan tidak mustahil terjadi kasus guru "klehabisan" bahan.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Tanpa dimilikinya kompetensi itu, mustahil guru dapat melaksanakan perannya dengan baik yang pada giliran selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pendidikan. Standar kompetensi guru adalah kriteria untuk menentukan kemampuan guru dalam membantu siswa mencapai standar materi dan untuk kerja yang tinggi. Kriteria ini meliputi kemampuannya dalam menyiapkan program pembelajaran, mengkomunikasikan pengetahuannya, ketrampilan-ketrampilan paedagogiknya, dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan disiplin akademik dan professional. Secara ringkas kompetensi guru menyangkut dua aspek yakni kompetensi penguasaan bahan ajar dan kompetensi penguasaan pembelajaran.

Kinerja Guru PKn Dalam Mengoptimisasi Proses dan Hasil Belajar.

Undang-Undang sistim pendidikan nasional No.20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. Berkenaan dengan itu, maka Hamzah Uno, dkk (2013:7) menegaskan bahwa terwujudnya pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang terus menerus selalu meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian upaya meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sebab muara dari berbagai program pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang

berkualitas. Oleh sebab itu dikatakan bahwa upaya meningkatkan pendidikan tidak akan tercapai tanpa adanya peningkatan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan upaya optimalisasi proses dan hasil belajar secara keseluruhan karena hakikat kualitas pembelajaran adalah merupakan kualitas implementasi dari program pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Upaya proses dan hasil belajar memerlukan informasi hasil assessment terhadap kualitas proses dan hasil belajar sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembaharuan dalam pembelajaran, kegiatan assessment terhadap kualitas pembelajaran yang sedang maupun telah berjalan sebelumnya perlu dilakukan dengan baik. Kemudian untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik, maka hasil assessment program sebelumnya merupakan acuan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sehubungan dengan itu maka Hamzah Uno, dkk (2013:8-9) menegaskan bahwa sebagai guru hendaknya berupaya agar siswa mencapai keberhasilan belajar sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses belajar selalu dikaitkan dengan hasrat belajar, maksudnya bahwa proses dapat dikatakan optimal apabila hasil yang diperoleh sebagai akibat dari proses sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun menjadi pertanyaan apakah proses dan hasil siswa sudah optimal dan bagaimana caranya agar proses belajar siswa dapat berlangsung secara optimal. Berknaan dengan itu dikemuakkan bahwa dengan melakukan evaluasi secara cermat, akan diketahui apakah proses belajar siswa sudah optimal atau belum. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat diidentifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan mendasarkan diri pada hasil identifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dan akan ditindaklanjuti dengan upaya mengoptimalisasi proses dan hasil belajar dari siswa itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), maka tentunya guru PKn dapat meninjaklanjuti untuk mencapai tujuan sekaligus dapat menunjukkan kualitas kinerja dari PKn itu sendiri. Guru PKn dapat memperhatikan upaya pengoptimalisasi proses dan hasil belajar dengan cara menguasai kompetensi dalam hal penguasaan bahan ajar dalam PKn mencakup tiga aspek, yaitu: (1) memahami pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), (2) memahami ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), dan (3) memahami etika kewarganegaraan (civic ethics). Untuk aspek pengetahuan kewarganegaraan dan etika kewarganegaraan mencakup bahan ajar tentang nilai, moral dan norma, disamping menguasai bahan ajar tersebut, guru PKn hendaknya mampu mengimplementasikannya dalam program pembelajaran secara terpadu sehingga optimalisasi proses dan hasil dapat terealisasi.

Program pembelajaran yang harus dirancang guru PKn yang berkualitas agar proses dan hasil belajarpun maksimal, maka guru harus dapat menggunakan rumusan kata kerja operasional dalam pembuatan RPP sehingga dapat menargetkan bentuk perilaku (behaviour) yang diinginkan bagi siswa. Alasannya, kata kerja operasional seperti menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, atau membandingkan merupakan bentuk perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Sedangkan kata kerja memahami, menghayati, atau meyakini adalah bentuk perilaku yang tidak dapat

diamati secara langsung, sulit diukur, dan sulit dievaluasi. Akibatnya tidak sedikit siswa yang mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan materi pokok bahasan tertentu, akan tetapi tidak memahami apa yang disebutkan, apalagi menghayatinya. Contoh yang paling nyata adalah dalam kasus P-4 yang dilaksanakan pada waktu program pemerintah yang lalu, dimana banyak siswa yang mampu menyebutkan dengan lancar butir-butir pengamalan pancasila, tetapi semua itu kurang dipahami, apalagi dihayati.

Selain itu guru PKn yang berkualitas dalam hal aktualisasi kinerjanya sehubungan dengan melaksanakan tugas pokok mendidik dan mengajar, dimana dalam konteks PKn sebagai pembelajaran nilai, setelah guru dapat melampaui pengembangan ranah kognitif, selanjutnya harus difokuskan untuk mengembangkan ranah afektif. Dalam merumusan tujuan yang bersifat afektif, guru janganlah sampai terjebak oleh keharusan penggunaan kata kerja operasional sebagai bentuk perilaku (*behavior*) yang diinginkan. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang bermaksud agar siswa mematuhi nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat tidak perlu diganti dengan rumusan "siswa dapat menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai kesopanan", hanya karena kata mematuhi itu bersifat tidak operasional, sedangkan kata menjelaskan itu bersifat operasional. Jika rumusannya sebatas itu dan tidak ada rumusan lain yang bernuansa afektif, maka tidak aneh jika hasil pembelajaran yang dicapai juga sebatas kemampuan verbal untuk menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai kesopanan. Kemampuan verbal semacam itu belum sesuai dengan standard kompetensi siswa untuk suatu pembelajaran nilai sebagai orientasi dari pembelajaran PKn di sekolah.

Sehubungan dengan itu, maka guru PKn yang berkualitas harus dapat memahami dan mempraktekkan secara komprehensif berbagai hal yang merupakan kompetensi dalam Pendidikan kewarganegaraan, sehingga proses dan hasil belajar terealisasi secara optimal. Kompetensi yang dimaksudkan yakni sebagai berikut: 1) Kompetensi yang dihasilkan melalui PKn mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan, serta keterampilan seperti kemampuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, social, dan budaya; 2) Pengetahuan dan pemahaman PKn mencakup (a) pedoman hidup dalam seluruh setting kehidupan setiap warganegara, (b) pedoman hidup bersama sebagai bangsa dan negara, (c) konsep dan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi 1945, (d) konsep demokrasi, hak dan kewajiban setiap warganegara, dan (e) pedoman untuk menjadi warganegara yang baik, warga negara kreatif, dan bertanggungjawab dan siap memasuki abad ke 21; 3) Sikap yang mencakup sikap dan kepercayaan terhadap nilai-nilai, norma, dan moral yang tumbuh di masyarakat, konsistensi terhadap standar-standar kehidupan, hak dan kewajiban, serta harkat dan martabat dan hak-hak asasi manusia; dan 4) Keterampilan terutama keterampilan intelektual dalam mengambil keputusan, dan dalam berpartisipasi dalam melaksanakan peran dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat.

Implementasi penguasaan kompetensi guru PKn dalam pembelajaran, terkadang menemui berbagai kendala. Seperti dikemukakan Hamzah Uno, dkk (2013:10), bahwa memang benar dalam praktek pembelajaran di kelas, betapapun baik kualitas pembelajaran yang dilakukan, selalu saja ada aspek-aspek yang masih belum sesuai

harapan. Biasanya masih ada siswa yang proses belajarnya masih belum optimal atau ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih belum tuntas. Optimalisasi proses dan hasil belajar bertujuan untuk meminimalkan atau meniadakan siswa yang tidak berhasil. Oleh sebab itu optimalisasi proses dan hasil belajar diarahkan agar seluruh siswa dapat mencapai keberhasilan, baik proses maupun hasil belajarnya.

Jelaslah dalam kondisi yang dimaksudkan di atas, bagi guru PKn perlu mempertimbangkan alternatif mana yang paling memungkinkan untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil yang dicapai. perlunya bagi guru untuk melakukan umpan balik dan mengoreksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Suatu kepastian sikap dan perilaku guru dengan menyadari apakah strategi, metode, atau struktur tugas, dan perangkat yang diperlulakn belum optimal, sehingga dengan cara itu tentunya guru dapat memperbaiki kegagalan dalam hal proses dan hasil. Langkah selanjutnya guru perlu mencoba berbagai alternatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari solusinya serta melakukan berbagai inovasi, sehingga optimalisasi proses dan hasil belajar dapat terealisasi dengan baik. Tentunya juga dalam pembelajaran PKn yang berorientasi pada pembelajaran nilai, moral dan norma, dan pelaksanaan evaluasinya oleh guru bukan penekanan pada hasil namun pada proses. Maka jelaslah bahwa kinerja guru untuk mendapatkan proses dan hasil belajar optimal harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tercapailah proses dan hasil secara komprehensif, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun dalam aspek psikomotor.

Namun demikian, suatu kenyataan terjadi bahwa apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, maka disinilah merupakan suatu kendala yang harus dicari solusinya seperti dikemukakan pada uraian di atas. Guru dalam kondisi ini harus mampu menunaikan tugas dengan baik dan berkualitas, dan sebagai guru profesional di bidang pembelajaran PKn, tentunya sangat diharapkan kinerja guru dapat memainkan peranannya secara utuh dengan mencari alternatif penyelesaiannya. Semua alternatif solusi yang dilakukan haruslah mengarah pada upaya menghilangkan penyebab kegagalan dan menguatkan untuk mencapai keberhasilan siswa. Upaya menyelesaikan masalah yang muncul itu, dapat dilakukan oleh guru melalui perbaikan yang disebut pengajaran remedial. Selanjutnya upaya menguatkan untuk ketercapaian keberhasilan dapat dilakukan melalui pemantapan atas ketercapaian keberhasilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Hamzah B. Uno, dkk (2013:10-11) menegaskan bahwa dari berbagai alternatif solusi yang dapat diajukan, langkah berikut adalah memilih alternatif mana yang paling optimal. Alternatif solusi yang dapat diajukan merupakan daftar upaya yang dilakukan untuk menjawab atau memperbaiki penyebab kegagalan. Sebagai contoh yang dikemukakan adalah misalkan guru telah menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan belajar siswa adalah soal-soal pada lembar kerja siswa (LKS) yang sulit untuk dimengerti siswa. Atas dasar faktor tersebut, maka guru dapat melakukan beberapa upaya berupa: a) memperbaiki soal-soal yang sulit dipahami siswa (misalnya, kalimat yang salah cetak, dsbnya); dan b) menyederhanakan soal-soal tersebut.

Pada prospek seperti itu, maka oleh Hamza B. Uno, dkk., kembali memberikan pandangan bahwa penyebab kegagalan mungkin berasal dari strategi pembelajaran yang digunakan perangkat pembelajaran, media, struktur tugas atau dalam menentukan pengetahuan prasyarat. Guru perlu memiliki beberapa alasan dan argumen bahwa

alternatif yang diajukan secara logis dapat memperbaiki kegagalan. Kemudian guru harus juga memiliki alasan dan argumen bahwa alternatif upaya optimalisasi yang diajukan mempunyai cukup peluang untuk mengkondisikan siswa lebih aktif dalam proses belajar di kelas, sehingga serta merta akan memperoleh hasil belajar yang baik dan optimal.

Secara konsisten proses dan hasil yang optimal itu yang menjadi tujuan setiap guru, termasuk guru PKn dalam mengaktualisasi kinerjanya pembelajaran, maka dengan komitmen dari guru PKn itulah dimana apa yang diharapkan dalam kompetensi pembelajaran PKn akan terwujud. Apabila kompetensi yang diharapkan tercapai, maka jelaslah bahwa proses dan hasil belajar yang optimalpun tercapai. Maksudnya para siswa/peserta didik/ sebagai warga negara akhirnya secara kuantitas dan secara kualitas dapat dikatakan berhasil, sekaligus dalam konteks pembelajaran PKn, dimana siswa memiliki kemampuan secara komprehensif dan menunjukkan warga negara yang memiliki *civic intelegensi*, *civic responsibility*, dan warga negara yang memiliki *civic participation*.

Daftar Rujukan

- Cece Wijaya dan Tabrani Rusyana, 1999., *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Darmin Sudarwan, *Pedagogic Andragogik, dan Hulatagogik*, 2010., IKIP Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004., *Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Atas*, Jakarta
- Doroche, E.F., 1987., *An Administrator's Guide For Evaluating program and Personnel*, Boston: Allyn and Bacon.
- Fattah, Nanang, 2003., *Landasan Kependidikan*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya
- Hadari Nawai, 1985., *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Hamzah B.Uno, Satria Koni, 2013., *Assessment Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhon Suprihartono, 1997., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: UT
- Kosasih Djahiri, 1999., *School Civic Education: Rationales, Essential Elemens, and Basic Concepts*, IKIP Bandung.
- Kusuma, M Indradi dan Wahyu Effendi, 2002., *Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dan Gerakan Anti Diskriminasi.
- Kusuma, M Indradi dan Wahyu Effendi, 2002., *Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dan Gerakan Anti Diskriminasi.
- Mathis, Robert L dan Jackson, John H. 2002. *Manajemen SDM*. Jakarta: Salemba Empat
- Moh. Uzer Usman, 2006., *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nu'man Sumantri. 1999. *Community Civic Education: Basic Concepts and Essential Elements*, IKIP Bandung.
- Payaman J. Simanjuntak, 2005., *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LPFE UI.
- Sedarmayanti, 2001., *SDM dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju
- Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Atas, 2004., Jakarta: Depdiknas.

- Sudarwan Danim, 2010., *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*, Bandung: Alfabeta
- Suryo Subroto, 1997., *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Rinelka Cipa
- Uhar Suharsaputra, 2010., *Administrasi Pendidikan*; Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (A.S.N.) dan Peraturan Pelaksanaannya, 2014.,
Edisi Lengkap, Jakarta: Fokusmedia.
- Undang-Undang No. 14. Tahun 2005., Tentang Guru dan Dosen.
- Wahyu Saidi, 2007., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Unit Layanan Psikologi PKMT Press.
- Wibowo, 2007., *Manajemen Kinerja Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers.
http://guruvalah.20m.com/stres_motivasi_kinerja2a.pdf